

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PROYEK PELEBARAN
JALAN YANG DIKERJAKAN PEMERINTAH KOTA BATAM
(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA BATAM)**

SKRIPSI



Oleh

Harveno

150710040

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PROYEK PELEBARAN
JALAN YANG DIKERJAKAN PEMERINTAH KOTA BATAM
(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



Oleh

Harveno

150710040

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 08 februari 2019
Yang membuat pernyataan,

Harveno
150710040

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PROYEK PELEBARAN
JALAN YANG DIKERJAKAN PEMERINTAH KOTA BATAM
(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sajrana**

**Oleh
Harveno
150710040**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 08 Februari 2019

**Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Jalan merupakan aset daerah yang dinikmati seluruh masyarakat. Pemerintah diketahui adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan mengelola jalan, setiap daerah memiliki tata pengelolaa jalan yang berbeda, terdapat dua lembaga yang sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola jalan dikota Batam, lembaga tersebut adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berwenang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 dan Pemerintah Kota Batam yang berwenang berdasarkan Pasal 9 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban mengenai kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam pengelolaan jalan yang hak pengelolaannya dimiliki oleh BP Batam, dan status hukum tanah setelah proyek pelebaran jalan selesai dikerjakan. Penulis dalam menemukan jawaban terkait masalah tersebut menggunakan metode penelitian empiris, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh penulis dari hasil wawancara dengandengan Dinas Bina Marga dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di kota Batam. Hasil penelitian adalah terkait kewenangan Pemerintah Kota Batam terhadap jalan yang dimiliki BP Batam telah diadakan suatu perjanjian pinjam pakai antara kedua lembaga, perjanjian tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam dengan tujuan membangun sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas sebagai pemerintahan daerah. Mengenai status diketahui dalam perjanjian tersebut tidak memberikan kepemilikan kepada Pemerintah Kota Batam, status Kepemilikan tetap dimiliki oleh BP Batam.

Kata kunci:Jalan, Kewenangan, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

Road is local asset that society take benefit of. Government is known as an institution that has the right to take care and manage the road, however each city has their own road governance. There are two institutions that have authority to govern road in Batam, those are Batam Free Trade Zone and Free Port Management Agency (BP Batam) that was authorized based on President Decree No. 41 Year 1973 and Act No. 36 Year 2000 and Batam City Government that was authorized based on article 9 section 4 in conjunction with article 12 section 12 letter D of Act No. 23 year 2014 about local government. The purpose of this research is to find the justification of Batam City Government authority to manage the road when the management right is owned by BP Batam, along with road legal status after road widening project finish. Author approach the research problem by using empirical research method with qualitative approach. Data were obtained by author from interviews conducted with Department of Highways along with Financial and Asset Management Agency in Batam. Research results shown that there is lease agreement between two institutions, where BP Batam gave an authority to Batam City Government to perform their duty as local government to build infrastructures. In relation to the legal status, the agreement stated that the ownership is still owned by BP Batam and not transferred to Batam City Government.

Keywords: Road, Authority, Local Government.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang hingga saat ini masih memberikan limpahan rahmat serta anugerah dari-Nya, sehingga Penulis dapat merampungkan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran bersifat membangun untuk menyempurnakan Skripsi ini. Penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini selalu mendapatkan bantuan berupa bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Efli Husda, S.Kom.,M.SI.selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora;
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora sekaligus Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Segenap Pimpinan dan Staff di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam;
7. Segenap Pimpinan dan Staff di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam;

8. Kedua orang tua penulis, ayahanda Almarhum Bong Sin Min dan Ibunda Hua Lin dan seluruh keluarga saya yang senantiasa memberikan doa serta dukungan selama ini, sehingga saya tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan saya serta dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik;
9. Bapak Effendi Sekedang, S.H., M.H. telah memberikan ilmu maupun pengalaman serta saran kepada penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum;
11. Ucapan terima kasih untuk yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran serta dorongan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf. Besar harapan Penulis pada penulisan Skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan, Amin.

Batam, 08 februari 2019

Harveno

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.6.2. Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Kerangka Teori.....	11
2.1.1. Tinjauan Umum Otonomi Daerah	11
2.1.1.1. Tinjauan Umum Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah.....	14
2.1.1.2. Tinjauan Umum Tujuan Otonomi Daerah	16
2.1.2. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah	17
2.1.3. Tinjauan Umum Kewenangan Pemerintah Kota	20
2.1.4. Tinjauan Umum Urusan Pemerintah Kota.....	25
2.1.5. Tinjauan Umum Dualisme Pemerintahan Kota Batam.....	28
2.1.6. Tinjauan Umum Jalan.....	30

2.1.7. Teori Pembangunan	33
2.1.8. Teori Kemanfaatan	35
2.2. Kerangka Yuridis.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
3.2. Metode Pengumpulan Data	41
3.2.1. Jenis Data.....	41
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	42
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	43
3.3. Metode Analisis Data.....	43
3.4. Penelitian Terdahulu	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1. Hasil Penelitian.....	49
4.2. Pembahasan	62
4.2.1. Kewenangan Pemerintah Kota Batam melakukan proyek pelebaran jalan di atas tanah yang hak pengelolaannya dimiliki oleh BP Batam	62
4.2.2. Status hukum tanah milik BP Batam setelah proyek pelebaran jalan selesai dikerjakan	76
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1. Simpulan.....	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran 3 Surat Keterangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Batam

Lampiran 4 Foto

Lampiran 5 Perjanjian Pinjam Pakai Antara Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Pemerintah
Kota Batam Tentang Pinjam Pakai Aset Jalan Milik Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup